



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WINDY RAKHMAWATI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET**
3. NHK : **868067**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.830.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 225.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	750.871.588
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.805.871.588
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.805.871.588

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.